



JOGJA KITA

Hindari Tumpang Tindih Bantuan untuk Warga Terdampak Covid-19

Penyaluran Bansos

Tinggal Tunggu Pendataan

Pemerintah Pusat akan segera menyalurkan bantuan sosial (Bansos) tunai bagi warga yang terkena dampak Covid-19. Meski Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi acuan prioritas, warga terdampak diluar DTKS masih bisa diusulkan sebagai penerima.

"KAMI memberikan opsi kepada Pemerintah Daerah apabila ingin memasukkan KK di luar DTKS, itu tidak harus namun dengan DTKS tentu akan lebih mudah," ucap Mensos Juliari Batubara pada *video conference* bersama seluruh bupati dan wali kota di wilayah Jateng dan DIJ, Kamis, (16/4).

Dengan begitu penerima bansos tunai adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, ditambah usulan dari daerah yang meliputi KK Non PKH, KK Non Program Sembako, KK Non Prakerja dan Non DTKS dan *by Name by Address, by NIK* dan *by Nomor Telepon*.

"Jika ada informasi warga terdampak yang patut diberikan bansos namun di luar DTKS silahkan dimasukkan, yang penting datanya dilengkapi akan disiapkan dalam sistem folder khusus untuk data penerima di luar DTKS yang terkena dampak Covid-19," papar Mensos.

Pihaknya menjelaskan, bansos tunai akan diberikan selama tiga bulan yakni April, Mei dan Juni dengan jumlah Rp 600 ribu tiap KK tiap bulan. Total penerima bantuan

sebanyak sembilan juta keluarga dari 33 Provinsi diluar DKI Jakarta.

Mensos menegaskan bansos tunai ini hanya bersifat sementara selama penanganan pandemi Covid-19 sehingga tidak bersifat reguler.

Di Kota Jogja sendiri, Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi (HP) mengatakan, pemkot belum mendistribusikan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak covid-19. Dikarenakan saat ini pemkot, pemkab, dan provinsi masih mensinkronkan data sasaran dengan pemerintah pusat.

Agar sasaran penerima manfaat tidak terjadi tumpang tindih. "Mengingat soal bantuan sosial ini perlu didistribusikan dengan benar dan tepat sasaran," tuturnya.

HP menyebut pada tahap pertama sudah mengalokasikan anggaran untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 12 miliar. Jumlah ini dialokasikan untuk pembelian alat kesehatan, alat pelindung diri (APD) dan beberapa untuk pencegahan sebaran covid-19. Termasuk juga pemberian gizi kepada tim medis dan penderita covid-19 dengan pemberian multivitamin dan lain-lain. "Ini termasuk beberapa juga dibantu makanannya," jelasnya.

Selain itu, pemkot juga sudah mengalokasikan dalam dana tak terduga senilai Rp 50 miliar baik untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial. "Kami masih meredesain APBD untuk keperluan yang sama," imbuhnya.

Anggaran untuk penanganan pandemi wabah virus korona sebagian sudah

Kepala



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005